

Menggali Akar Ideologis Integrasi Keilmuan dan Keislaman di Universitas Islam Indonesia

Suyanto Thohari

Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
suyanto_uui@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Diterima 30 Desember 2019
Direvisi 3 Februari 2020
Dipublikasi 22 Maret 2020

Kata kunci:
akar ideologis, integrasi keilmuan dan keislaman, historis

ABSTRAK

Integrasi keilmuan dan keislaman menjadi isu terus menguat dari waktu ke waktu dalam perjalanan Universitas Islam Indonesia (UII). Tema ini terus menjadi perbincangan, pada level konseptual filosofis maupun manajemen praktis. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di UII terwarnai oleh konsep integrasi keilmuan dan keislaman ini. Bahkan, isu ini bukan hanya milik UII, tetapi tampaknya juga perguruan tinggi Islam lain, baik yang berupa sekolah tinggi, institute, maupun universitas Islam. Ambil contoh misalnya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dikenal public mencoba menerapkan konsep integrasi-interkoneksi antar keilmuan. Bahkan konsep integrasi-interkoneksi yang ide dasarnya dari Amin Abdullah, secara simbolik diwujudkan dalam konsep arsitektural bangunan kampus yang saling terhubung dan tersambung antara bangunan fakultas satu dengan fakultas yang lain. Konsep integrasi keilmuan dan keislaman menjadi ide klasik yang terus mencari momen penguatan setiap waktu bahkan tampaknya sampai seterusnya. Di UII, ide dasar integrasi keilmuan seringkali merujuk pada pernyataan Muhammad Hatta, salah satu founding fathers UII, yang menyatakan bahwa di STI (cikal bakal UII) akan “bertemu agama dan ilmu dalam suatu kerja bersama”. Pernyataan ini terus menjadi narasi yang diulang, sehingga tertanam kuat pada setiap stakeholders UII. Pertanyaan yang muncul, bagaimana sesungguhnya akar ideologis integrasi keilmuan dan keislaman di UII? Tulisan ini mencoba melacak secara historis akar ideologis integrasi keilmuan dan keislaman di UII. Dengan pendekatan historis ditemukan bahwa, watak integratif dan eklektif dari UII sudah sejak awal ditemukan, jauh sebelum STI berdiri. Berdirinya UII juga merupakan kelanjutan dari proyek modernisasi Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya pembaharuan Islam dan kelanjutan system pendidikan madrasah. Dalam bahasa lain, akar ideologis integrasi keilmuan dan keislaman ditemukan sejak munculnya konsep pendidikan madrasah, sebagai model integrasi system pendidikan Islam dan barat. Pada level perguruan tinggi, lahirnya UII dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari system pendidikan madrasah

Pendahuluan

Wacana integrasi keilmuan dan keislaman di perguruan tinggi Islam menjadi isu yang tidak pernah selesai untuk dibahas. Metamorphose beberapa perguruan tinggi Islam menjadi

universitas juga menyertakan isu ini menjadi salah satu isu sentral strategi pengelolaan perguruan tinggi. Bahkan, semangat menjadikan IAIN menjadi UIN antara lain adalah untuk mewujudkan integrasi keilmuan

di satu sisi dan keislaman di sisi yang lain. Basis filosofis digali hingga strategi implementasi.

Melacak akar ideologis integrasi keilmuan dan keislaman di Universitas Islam Indonesia, sebagai universitas islam tertua, menjadi menarik, karena justru dari sana akan ditemukan secara genuine bagaimana konsep integrasi keilmuan dan keislaman itu secara implementatif diterapkan di perguruan tinggi. Mengapa integrasi keilmuan dan keislaman ini menjadi salah satu pilihan pada awal universitas ini didirikan, sehingga dapat dimaknai bahwa melalui konsep integrasi keilmuan dan keislaman akan melahirkan cara pandang beragama sekaligus jawaban atas ketertinggalan umat Islam. Berdirinya Universitas Islam Indonesia dipandang sebagai salah satu gerakan modernisasi Islam di Indonesia dan pilihan konsep integrasi keilmuan dan keislaman menjadi nafas pergerakannya yang diharapkan melahirkan sosok insan kamil. Oleh karenanya, melacak akar ideologis integrasi keilmuan dan keislaman di UII menjadi menarik. Akar ideologis yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pemahaman yang mendasari lahirnya pilihan integrasi keilmuan dan keislaman menjadi salah satu proyek besar yang diusung oleh UII.

Tulisan ini menggunakan pendekatan dan metodologi sejarah, dengan sumber-sumber data utama dari buku-buku sejarah UII, berita seputar kelahiran UII dan sejarah umat Islam sebelum lahirnya UII. Untuk melacak data tentang UII dari masa awal pendirian ditelusuri dengan menggali data dari

Koran, berita harian, majalah yang terbit dan relevan dengan waktu seputar lahirnya UII. Antara lain *Soeara MIAI*, *Soeara Muslimin Indonesia*, *Majalah Kanpo*, *Harian Kedaoelatan Rakjat*, *10 Tahun University Islam Indonesia*, buku *5 Windu UII*, buku *Setengah Abad UII*, buku *Sejarah dan Dinamika UII*, dan buku *UII Way: Menjadi Islami, Indonesiawi dan Mondial*. Selain buku-buku tersebut, dipergunakan laporan Tahunan Rektor, Laporan Akhir Masa Jabatan Pengurus Yayasan, Statuta UII, dan Anggaran Dasar UII.

Akar ideologis integrasi keilmuan dan keislaman di UII dapat ditemukan antara lain: *Pertama*, UII lahir sebagai kelanjutan sistem pendidikan madrasah yang ada di Indonesia, sebagai bentuk modernisasi pendidikan Islam, dari sebelumnya berbentuk pesantren. *Kedua*, UII lahir sebagai sebuah gerakan kultural dan mobilitas sosial umat Islam untuk melahirkan pemimpin bangsa. *Ketiga*, UII lahir sebagai bagian dari gerakan modernisasi Islam di Indonesia.

UII, Madrasah, dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia: Semangat Keterpaduan Ilmu dan Agama.

Menurut hemat penulis, ada keterkaitan antara UII dan pertumbuhan madrasah di Indonesia sebagai gerakan pembaharuan pendidikan Islam. UII dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari pertumbuhan madrasah yang merupakan gerakan pembaharuan pendidikan Islam tersebut.

Mengikuti alur perkembangan pendidikan Islam di Indonesia yang digambarkan Karel A. Steenbrink, pertumbuhan pendidikan di Indonesia berawal dari pendidikan agama yang sangat sederhana, berupa pengajaran Al-Qur'an, khususnya *Al-Fatihah* dan *Juz 'Ammah* (Juz 30 dari Al-Quran), tata cara shalat dan ibadah-ibadah dasar kemudian berkembang menjadi pesantren. Pendidikan lebih lanjut adalah apa yang disebut Steenbrink sebagai pengajian kitab yang dilaksanakan di pesantren.¹ Metamorphose pendidikan Islam dari pengajaran agama sederhana menjadi pesantren tersebut sepertinya mirip dengan perkembangan pendidikan Islam di Timur Tengah (khususnya di Baghdad) sebagaimana dilaporkan George Makdisi. Makdisi menyebutkan bahwa lembaga pendidikan Islam dari kegiatan pendidikan berbasis masjid, bertransformasi menjadi *masjid khon* (masjid yang didampingi pemondokan), berikutnya menjadi madrasah, satu kompleks yang semua kebutuhan hidup dan pembelajaran siswa dipenuhi di dalamnya (makan, tempat tidur, ruang belajar, ruang ibadah dan sebagainya).² Apa yang disebut

“madrasah” oleh Makdisi serupa dengan bentuk pesantren yang ada di Indonesia. Madrasah yang dimaksud Makdisi adalah kasus Madrasah Nidzamiyah di Baghdad yang berdiri tahun 459 H/1067 M.

Institusi pendidikan yang lahir pada masa kolonial setelah pesantren adalah sekolah-sekolah yang diselenggarakan Gubernur Kolonial Belanda. Semula terbatas sekelompok kecil masyarakat Indonesia (terutama kelompok berada), kemudian sejak 1870 mulai tersebar pendidikan rakyat, yang berarti juga untuk umat Islam. Meskipun sebagaimana ditulis Steenbrink, jenis pendidikan ini baru mulai merata pada permulaan abad 20 setelah pemberlakuan politik etis (*etische politiek*).³

Seiring dengan kontak tokoh Islam di Indonesia dengan jaringan ulama di Timur Tengah dan Mesir,⁴ khususnya akhir abad ke-19 dengan tokoh sentral Timur Tengah Muhammad Abduh, mulai muncul madrasah. Meskipun tokoh Muhammad Abduh banyak disebut sebagai pemberi pengaruh besar dalam pembaharuan itu, tetapi tentu saja tidak tunggal.⁵ Keberadaan madrasah tersebut dibaca sebagai alternatif pembaharuan

¹ Laporan Steenbrink ini didasarkan pada catatan Snouck Hurgronje, *Verspreide Geschriften, De Atjehers I*, Brumund, *Het Volksonderwijs*, Achmad Djajadiningrat, *Herinneringen*, Muhammad Radjab, *Semasa Ketjil di Kampung*, Hamka, *Kenang-kenangan hidup*, Mahmud Junus, *Sedjarah*, Aboebakar Atjeh, dan sebagainya. Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah...*, 8-11.

² George Makdisi, *The Rise of College: Institutions of Learning in Islam and the West* (Texas: Edinburg University Press, 1981), 27 – 32.

³ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah...*, 23 – 24

⁴ Istilah jaringan ulama ini menjadi populer sejak Azyumardi Azra meneliti jaringan ulama nusantara dengan ulama Timur Tengah abad XVII dan XVIII, yang menjadi akar pembaharuan Islam di Indonesia. Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), xxvi – xxvii.

⁵ Muhammad Murtadho menyebut bahwa salah satu inspirator dan pelopor pembaharuan pendidikan Islam (madrasah) Syekh Ahmad Khotib al-Minangkabawi (1860 – 1916), yang menjadi Imam Haramain dan Maha Guru ulama-ulama nusantara. Murid-murid beliau, seperti Tahir Jalaludin al-Azhari mendirikan *Madrasah*

pendidikan Islam sekaligus sebagai jalan tengah dari sistem pendidikan pesantren dan sekolah Gubernemen. Munculnya madrasah di Indonesia sebagai salah satu gerakan pembaharuan pendidikan Islam secara kronologis dirangkum oleh Muhammad Murtadho, yang terkoneksi juga dengan madrasah yang ada di Asia Tenggara. Dari awal kemunculan madrasah sampai dengan menjelang lahirnya UIR 1945, menarik untuk dirunut.

Madrasah paling tua yang muncul di Indonesia adalah *Madrasah Mambaul Ulum* Surakarta, yang didirikan oleh Sunan Pakubuwono X tahun 1905. Pada saat yang sama, Abu Bakar bin Ali Shahab mendirikan Madrasah Jami'at Khaer di Jakarta. Pada tahun tahun 1907, Syekh Tahir Jalaludin Al-Azhari bersama Syed Ahmad al-Hadi mendirikan Madrasah al-Iqbal al-Islamiyah di Selegie Road, Singapore yang menginspirasi berdirinya Madrasah al-Adabiyah di Padang Panjang (1909) dan Madrasah al-Hadi di Bandar Kaba Malaysia (1917). Tahun 1910 Syekh Taib Umar mendirikan Madrasah School di Batusangkar, kemudian Syekh Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka) mendirikan Madrasah Thawalib di Padang Panjang. Tahun 1911 KH. Ahmad Dahlan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah sebagai Sekolah Dasar Islam

pertama di Yogyakarta yang mengajarkan pelajaran umum dan Islam sekaligus. Pada tahun 1912 KH Abdullah Salam mendirikan Madrasah Mathaliul Falah di Kajen Pati Jawa Tengah. Tahun 1914 Perthimpungan al-Irsyad al-Islamiyah (*Jam'iyat al-Ishlah wa al-Irsyad al-Islamiyah*) mendirikan Madrasah al-Irsyad al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pada tahun yang sama, 1914, madrasah pertama di lingkungan pesantren yang bercorak modern digagas oleh KH Wahab Chasbullah dengan KH Mansyur di Surabaya.

Selanjutnya, pada tahun 1916, para kiai Banten mengadakan suatu musyawarah untuk sebuah perguruan Islam dalam bentuk Madrasah (9 Agustus 1916), yang merupakan embrio organisasi Mathlaul Anwar di Banten. Pada tahun yang sama, 1916, Madrasah Sulthaniyah di Sambas, madrasah pertama di Kalimantan Barat, didirikan atas restu Sultan Muhammad Tsafiudi II. Pada tahun 1918, Mahmud Yunus mendirikan Diniyah School sebagai lanjutan dari Madrasah School di Batusangkar.

Berikutnya, pada tahun 1919 KH Hasyim Asy'ari mendirikan Madrasah Salafiyah di Pesantren Tebuireng Jombang Jawatimur. Pesantren Tebuireng sendiri berdiri dua puluh tahun sebelumnya, tahun 1899. Pada tahun yang sama, 1919, berdiri Madrasah Daroel Oeloem di Majalengka oleh

al-Iqbal al-Islamiyah (1907) di Singapore, Syekh Abdullah Ahmad (terinspirasi juga oleh Tahir Jalaludin) mendirikan Madrasah Adabiyah di Padang Panjang (1907). Murid-murid yang lain adalah Syekh Djamil Djambek, Haji Karim Amrullah (pendiri Madrasah Thawalib), Syekh Hasan Maksom (Mufti Kerajaan Deli), Syekh Jamil Jaho (Pemimpin Perti), KH. Ahmad Dahlan,

dan KH. Hasyim Asy'ari, yang semuanya adalah pelopor pendidikan Islam di Indonesia. Lihat Muhammad Murtadho, *Dinamika Sejarah Madrasah di Asia Tenggara* (Jakarta: Pesagi Mandiri Perkasa, kerjasama naskah Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI dengan UIN Jakarta Press, 2018), xii-xiii.

Perserikatan Umat Islam (PUI) di bawah pimpinan KH Abdul Halim. Sementara itu di Malaysia, setelah tahun 1917 mendirikan Madrasah al-Hadi, Syekh Syed Ahmad al-Hadi mendirikan madrasah di Pulau Penang, yaitu Madrasah al-Masyhor al-Islamiyah.

Pada tahun 1922, Muhammad Imran mendirikan Madrasa Sulthoniyah di Sambas Kalimantan Barat. Pada tahun 1923, Rahmah al-Yunusiyah mendirikan Madrasah Diniyah Putri di Padang Panjang, madrasah perempuan di Indonesia yang menginspirasi Universitas Al-Azhar Mesir untuk membuka program untuk perempuan. Pada tahun 1926, H. Abdurrasyid mendirikan sekolah baru di tepi jalan Amuntai-Tanjung, yang kemudian pada tahun 1928 perguruan Islam ini diberi nama "Arabische School". Pada tahun 1927, Madrasah al-Junaid al-Islamiyah didirikan oleh Syekh Abdur Rahman bin Juneid Omar al-Juneid dari Palembang. Pada tahun yang sama, 1927, Madrasah Salafiyah al-Wathon berdiri di Sarang Rembang Jawa Tengah oleh KH Zubeir.

Berlanjut ke bumi Papua, pada tahun 1929, seorang pejuang dari Aceh, Bujang Salim, dibuang ke Merauke sebelum akhirnya dibuang ke Boven Van Digoel. Sewaktu di Merauke, ia sempat mendirikan Madrasah Nurul Huda (madrasah pertama di Papua) di Mopah Merauke. Pada tahun yang sama, 1929, berdiri Madrasah Putri Mathla'ul Anwar di Pandeglang yang dirintis tiga tokoh perempuan: Nyi H Jebab binti Yasin, Nyi Kulsum, dan Nyi Aisyah.

Berikutnya di pulau Sulawesi, pada tahun 1930, Muhammad As'ad mendirikan

Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) di Sengkang Sulawesi Selatan. Pada tahun yang sama, Syekh Salim al-Jufri mendirikan Madrasah al-Islamiyah al-Khairat di Palu. Madrasah ini kelak menjadi pusat organisasi kemasyarakatan al-Khairat.

Pada tahun 1933, Haji Sulong Tuan Mina mendirikan madrasah pertama di Thailand yang diberi nama Madrasah al-Maarif al-Wathoniyah al-Fattani. Pendirian madrasah ini diresmikan oleh pemerintah yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Thai. Pada tahun 1934, Sultan Shalahudin dari Kerajaan Bima bersama ulama dari Batavia bernama Syekh Husain Shabab mendirikan Madrasah Darul Ulum di Kampung Suntu Bima. Pada tahun yang sama, 1934 Madrasah al-Diniyah di Kampung Lalang, Perak didirikan oleh seorang lulusan Madrasah al-Masyhoor Malaka. Pada tahun 1935, Syekh Abdullah al-Maghribi mendirikan Madrasah al-Huda al-Diniyah yang bermadzhab Maliki di Pulau Penang. Di Lombok Nusa Tenggara Barat, pada tahun 1937, Muh Zainudin Abdul Madjid sepulang dari Mekah, ia merintis Madrasah Hamzanwadi di Pancor. Madrasah ini menjadi awal dari gerakan organisasi Nahdhatul Wathan di Pulau Lombok.

Seluruh kronologi tahun perkembangan madrasah di Asia Tenggara tersebut ditulis ulang dalam bentuk narasi dari table tahun dan peristiwa sejarah pendidikan madrasah di Asia

Tenggara, yang ditulis oleh Muhammad Murtadha.⁶

Perlu ditambahkan, di luar kronologi tahun sejarah madrasah di atas, pada tahun 1918, K.H.A. Dahlan mendirikan *Al-Qismul Arqa* yang kemudian diubah menjadi Pondok Muhammadiyah (tahun 1921), lalu menjadi *Kweekschool Moehammadiyah* (1923). Kemudian tahun 1924 siswa *Kweekschool Islam* dipisah antara pria dan wanita. *Kweekschool Muhammadiyah* untuk putra dan *Kweekschool Istri* untuk putri. Baru pada tahun 1932 *Kweekschool Muhammadiyah* diubah menjadi Madrasah Mu'allimin, *Kweekschool Istri* diubah menjadi Mu'allimaat. Setahun kemudian lokasi kedua madrasah tersebut dipisah. Madrasah Mu'allimin berlokasi di Ketanggungan Yogyakarta dan Madrasah Mu'allimaat bertempat di Kampung Notoprajan Yogyakarta. Pada Kongres Muhammadiyah Ke-23 tahun 1934 di Yogyakarta, ditegaskan bahwa Madrasah Mu'allimin-Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan Sekolah Kader Persyarikatan Tingkat Menengah yang diadakan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah; yang memiliki tujuan sebagai berikut: (1) mencapai tujuan Muhammadiyah, (2) membentuk calon kader Muhammadiyah, (3) menyiapkan calon pendidik, ulama dan zuama' yang berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan.⁷

Madrasah, secara istilah memang mengambil dari timur tengah, berbahasa Arab yang artinya leksikalnya "tempat belajar". Meskipun mengambil istilah Arab, secara kelembagaan pertumbuhan madrasah berbeda dengan pertumbuhan yang sama di Baghdad (Timur Tengah), di mana istilah "madrasah" dipergunakan untuk menunjuk lembaga pendidikan yang mirip pesantren di Indonesia. Sementara itu, perkembangan madrasah di Indonesia secara kelembagaan merupakan sintesis, jalan tengah dari sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan Gubernemen yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda. Istilah madrasah dimaknai dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Islam sekaligus pendidikan umum di dalamnya.

Jika madrasah-madrasah yang ada hingga saat sebelum kemerdekaan memberikan keterpaduan pembelajaran, atau setidaknya menambahkan pelajaran umum selain mata pelajaran agama pada jenjang dasar sampai menengah, hadirnya UII yang berawal dari STI mengisi kekosongan itu pada level pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang ada sebelum kemerdekaan RI adalah *Technische Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Tehnik) di Bandung pada tahun 1920 (Kelak menjadi Institut Teknologi Bandung). Kemudian tahun 1924, sebuah *Rechthoogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) dibuka di Batavia (Jakarta), dan pada tahun 1927 STOVIA diubah menjadi

⁶ *Ibid*, iii-vi.

⁷ M. Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 244.

Geneeskundige Hoogeschool (Sekolah Tinggi Kedokteran).⁸ STOVIA (*School tot Opleiding van Inlandesche Artsen*) adalah sekolah untuk pelatihan dokter-dokter pribumi, yang diubah pada tahun 1900-1902 dari “Sekolah Dokter Djawa” di Weltevreden.⁹

Mengambil inspirasi dari sistem pendidikan madrasah yang memadukan mata pelajaran Islam dan Umum, UII didirikan untuk memadukan keislaman dan keilmuan pada level perguruan tinggi, mengisi kekosongan sekaligus sebagai penyeimbang dari pendidikan tinggi yang ada sebelumnya. Dalam konteks ini, maka berdirinya UII dapat dikatakan sebagai gerakan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia pada level perguruan tinggi dengan semangat keterpaduan ilmu dan agama. Semangat keterpaduan ini semakin mengemuka, ketika Muhammad Hatta, dalam pidato pembukaan kembali STI di Yogyakarta setelah pindah dari Jakarta yang mengatakan:

Ujud Sekolah Tinggi Islam ialah membentok oelama' jang berpengetahoean dalam dan berpendirian loeas serta mempunjai semangat jang dinamis. Hanja oelama jang seperti itoelah jang bisa mendjadi pendidik jang sebenarnja dalam masjarakat. Di Sekolah Tinggi Islam itoe akan bertemoe AGAMA dengan ILMOE dalam soeasana kerdja bersama, untuk membimbing masjarakat ke dalam kesedjahteraan.¹⁰

⁸ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...*, 333-334.

⁹ *Ibid.*, 330.

¹⁰ STI semula berdiri di Jakarta tanggal 8 Juli 1945/27 Rajab 1364, bersamaan dengan pindahannya ibukota Negara ke Yogyakarta tanggal 4 Januari 1946, STI turut serta karena pendiri STI sebagian besar terlibat sebagai tokoh Negara. Setelah pindah ke Yogyakarta, tiga bulan kemudian ketika keadaan sudah memungkinkan,

UII: Strategi Gerakan Sosial Kultural dan Mobilitas Sosial untuk melahirkan pemimpin Bangsa

Kuntowijoyo, menyebut strategi perjuangan umat Islam dalam tiga bentuk, yang diwakili dengan istilah strategi struktural, strategi kultural, dan strategi mobilitas sosial. Strategi struktural disebut juga strategi politik, karena kebanyakan menggunakan sarana politik, mendirikan organisasi-organisasi, kelompok, aliansi yang dimaksudkan sebagai gerakan politik. Dalam masa kolonial, strategi struktural dimaksudkan untuk melepaskan belenggu kekuasaan kolonial, menuju Negara yang merdeka. Strategi kultural disebut juga dengan strategi sosial. Perbedaan strategi struktural dan strategi kultural menurut Kuntowijoyo ialah, strategi struktural mencoba mempengaruhi struktur politik (legislatif, eksekutif), sedang strategi kultural berusaha mempengaruhi perilaku sosial (cara berpikir masyarakat). Cara utama strategi kultural adalah penyadaran (symposium, seminar, penerbitan, dakwah, lobi, media massa) dan bersifat individual (mempengaruhi perorangan). Sedangkan strategi mobilitas sosial gerakan untuk mengusahakan masyarakat dan individu untuk

STI dibuka kembali pada tanggal 10 April 1946. Pada upacara pembukaan kembali tersebut, disampaikan pidato Muhammad Hatta yang berjudul “Sifat Sekolah Tinggi Islam”. Teks secara lengkap dicantumkan dalam lampiran, mengutip sekaligus mendokumentasikan ulang yang telah dimuat dalam buku *10 Tahun University Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Dewan Pengurus Pusat Badan Wakaf UII, 1955), 109-115.

naik dalam tangga sosial, yang ditempuh melalui pendidikan.¹¹ Adanya lembaga pendidikan menjadi instrument penting dalam mobilitas sosial vertical umat. Mobilitas sosial vertikal yang dimaksud adalah naiknya status sosial umat, dari status bawah karena kebodohan dan keterbelakangan naik menjadi masyarakat yang ber peradaban. Strategi mobilitas sosial menekankan pada perencanaan yang matang dan secara sadar mempersiapkan umat Islam mampu memegang peradaban. Pendidikan memiliki peranan penting dalam strategi mobilitas sosial tersebut.

Sebelum kemerdekaan, menurut Kuntowijoyo strategi perjuangan umat Islam sempat beralih dari strategi struktural ke strategi kultural. Ia menyebut contoh, perubahan strategi struktural ke strategi kultural dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara yang semula memakai strategi struktural beralih ke pendidikan (strategi kultural) dengan mendirikan Taman Siswa (1902). Demikian pula PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Soekarno semula memakai strategi struktural beralih ke strategi kultural pada tahun 1931 (setelah PNI bubar), di bawah Sjahrir PNI menjadi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), tidak lagi menekankan mobilisasi massa mempengaruhi struktur kekuasaan/kebijakan tetapi pembentukan kader.¹²

Sifat gerakan struktural politis biasanya sarat benturan kepentingan, baik yang bersifat pragmatis maupun ideologis. Kondisi ini misalnya terlihat pada Sarekat Islam (SI) sebagai organisasi Islam terbesar sebelum kemerdekaan, yang digambarkan Nasihin mengalami pergolakan yang besar dalam pencarian ideologi gerakan. Semula saat masih SDI (Sarekat Dagang Islam) memakai dasar Islam. Seiringi dengan menyebarnya ideologis sosialis, propaganda ideologi ini disusupkan pula dalam kelembagaan SI dengan membentuk ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereniging*) dan VSTP (*Vereniging voor Spoor en Tramweg Personeel*), organisasi yang memperjuangkan kepentingan buruh di Semarang. Sosialisme akhirnya menjadi wacana baru setelah ideologi pan Islamisme sebelumnya. Pada tahapan berikutnya, ketika SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam (1921) ideologi partai menjadi sosialisme Islam, penggabungan antara semangat *pan-Islamisme* dan sosialisme, di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto.¹³

Menurut Nasihin, secara politis dan ideologis, wacana Sosialisme Islam mendapat tantangan keras dari Soekarno yang menggagas wacana Sosialisme Indonesia yang dilembagakan dalam Perserikatan Nasional Indonesia (PNI Soekarno) tahun 1927. Ia menginginkan pemisahan agama dan politik, sementara Tjokroaminoto

¹¹ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam bingkai Strukturalisme Transendental* (Bandung: Mizan, 2001), 112-122.

¹² *Ibid.*, 122.

¹³ Nasihin, *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 4-6.

berpendapat agama tidak dipisahkan dalam kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik.¹⁴

Corak perdebatan ideologis tersebut hanya salah satu resiko pilihan strategi perjuangan dengan pendekatan struktural. Ketegangan yang terjadi dalam tubuh umat Islam bukan hanya dalam lapangan ideologis, tetapi juga melibatkan apa yang disebut Deliar Noer sebagai kelompok modernis dan tradisionalis. Ketegangan antara kelompok Modernis yang disebut “kaum muda” dengan kaum tradionalis yang disebut dengan “kaum tua”. Ketegangan mengemuka dan lebih didominasi corak perdebatan fikih, yang semakin meluas dan merugikan umat Islam, sehingga diadakan kongres Islam kedua di Garut tahun 1924, yang fokus utamanya membicarakan masalah fikih.¹⁵

Pertumbuhan organisasi-organisasi Islam sebelum kemerdekaan sangat dinamis, penuh semangat untuk menggalang persatuan menghadapi penjajahan, tapi pada saat yang sama diwarnai dengan ketegangan dan perdebatan, untuk tidak menyebut perpecahan. Mansur Suryanegara mencatat sejak tahun 1905 sampai dengan 1928, setidaknya ada delapan organisasi yang telah benar-benar berakar di masyarakat di Jawa dan Sumatra:¹⁶

1. Syarikat Dagang Islam (SDI) pimpinan Hadji Samanhoedi (16 Oktober 1905) di Surakarta, kemudian menjadi Syarikat Islam pada 1906. Pimpinannya

kemudian diserahkan kepada Oemar Said Tjokroaminoto di Surabaya pada saat SDI discorsing oleh Residen Surakarta pada 1912.

2. Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, yang didirikan KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912.
3. Hajatoel Qoeloeb (hayatul qulub) 1915, yang kemudian berkembang menjadi Persjarikatan Oelama pimpinan KH. Abdoel Halim di Majalengka pada tahun 1917.
4. Djamiyah Nahdhatoel Wathon pimpinan Wahab Chasboellah dan Mas Mansoer di Surabaya pada tahun 1916. Pendiriannya didahului oleh Tashwirul Afkar (1914) dan Nahdhatoel Tujjar (1920). Organisasi yang bergerak di sosial pendidikan ini kemudian menjadi Djam'iyah Nahdhatoel Oelama pimpinan Rais Akbar KH. Hasjim Asj'ari pada tahun 1926.
5. Mathlaoel Anwar pimpinan KH Moehammad Jasin di Menes (1915). Setelah ada Nahdhatoel Oelama, Mathlaoel Anwar berubah menjadi Mathlaoel Anwar li Nahdhatoel Oelama.
6. Persatoean Islam pimpinan Hadji Moehammad Junus dan Hadji Zamzam pada 17 September 1923 di Bandung. Kelanjutannya, A. Hassan dikenal sebagai guru utama Persatoean Islam.

¹⁴ *Ibid.*, 7

¹⁵ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Islam: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam*

Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bandung: Salamadani, 2013), 462.

¹⁶ *Ibid.*, 516.

7. Jong Islamiten Bond pada 1 Januari 1925, pimpinan Sjamsoeridjal, keponakan Soerjapranoto dari Pakualaman dan pemimpin pemogokan buruh dari Central Sjarikat Islam (organisasi pusat SI setelah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia).
8. Tarbijah Islamiyah (Perti) 1928 pimpinan Syekh Sulaiman Ar Roesli di Minangkabau.

Jika dicermati, organisasi-organisasi tersebut di atas ada yang dominan politik ada yang sosial pendidikan. Dibandingkan dengan pertumbuhan madrasah sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya, tampaknya strategi struktural dan kultural berjalan beriringan, meskipun beberapa memang beralih dari strategi struktural politik ke strategi kultural sosial. Contoh organisasi yang beralih dari strategi struktural ke strategi kultural dalam catatan Kuntowijoyo antara lain Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Perguruan Taman Siswa dan perubahan Partai Nasional Indonesia (PNI-Soekarno) menjadi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru di bawah pimpinan Sjahrir).¹⁷ Perubahan strategi dari struktural ke kultural tersebut Suwarsono Muhammad menyebutnya sebagai loncatan langkah dari politik ke sosial.

Setelah strategi Struktural dan Kultural, strategi perjuangan umat Islam berikutnya menurut Kuntowijoyo adalah strategi mobilitas sosial. Contoh strategi mobilitas sosial ini di era kemerdekaan (Orde Baru)

adalah lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berfungsi sebagai katalisator mobilitas sosial, yang dikatakan B.J. Habibie (Ketua ICMI pertama) sebagai organisasi yang bertujuan membawa umat pada *long march* menuju masa depan yang lebih baik.¹⁸

Lahirnya ICMI sebagai wadah persatuan ulama (cendekiawan Muslim) Indonesia, mirip dengan kelahiran MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) tahun 1937, sebagai wadah persatuan organisasi dan tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Ahmad Mansur Suryadilaga mencatat bahwa MIAI didirikan pada 21 September 1937. Menurutnya, MIAI lahir dari kesadaran ulama dari Persjarikatan Muhammadiyah, Al Irsjad, Persatoean Islam, Nahdlatul Oelama, Persjarikatan Oelama, pimpinan Partai Sjarikat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, dan Partai Arab Indonesia yang membangun wadah organisasi baru untuk meningkatkan kesadaran persatuan dan kesatuan umat. Organisasi baru tersebut adalah MIAI. Kesadaran melahirkan organisasi tersebut tampaknya didorong pula antara lain oleh pernyataan K.H. Hasjim Asj'ari yang berasal dari Nahdlatul Oelama pada Moektamar Nahdlatul Oelama ke-12 di Malang tahun 1937, sebagaimana telah dikutip pada bab sebelumnya.¹⁹

Kurang lebih dua tahun kemudian pada Kongres Al-Islam Indonesia II (2 – 7 Mei 1939) di Surakarta, KH. Mas Mansur dari

¹⁷ Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, 122.

¹⁸ *Ibid.*, 122.

¹⁹ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* ..., 555.

Persjarikatan Moehammadijah juga mengatakan hal senada dengan yang disampaikan KH. Hasjim Asj'ari pada Moektamar Nahdtahoel Oelama sebelumnya. Pernyataan KH. Mas Mansur selengkapnya sebagai berikut:

Pada beberapa tahoen jang soedah, kita gemar berbantah-bantahan, bermoesoehan di antara kita oemat Islam, malahan perbantahan dan permoesoehan itoe di antara oelama dengan oelama. Sedangkan jang diboeat perbantahan dan permoesoehan itu perkara ketjil sadja. Adapoen timbulnja permoesoehan itoe, karena kita berpegang koeat pada hoekoem yang dihoekoemkan oleh manusia. Kita boekan hidoep pada 25 tahoen yang laloe. Kita soedah bosan, kita soedah pajah bermoesoeh-moesoehan. Sedih kita rasakan kalaoe perboeatan itoe timboel daripada oelama. Padahal oelama itu lebih haloes budinja, berhati-hati lakoenya. Karena oelama itu sudah ditentoean menoeroet firman Allah: oelama itoe lebih takoet kepada Allah. Karena oelama tentoenya lebih mengerti kepada dosa dan bahaya bermoesoeh-moesoehan.²⁰

Mengutip hasil kajian Mizan Sya'roni, dikemukakan bahwa pada umumnya ada dua faktor yang mendorong lahirnya MIAI. *Pertama*, MIAI lahir sebagai tanggapan menurunnya kinerja organisasi Islam, terutama disebabkan konflik internal yang relatif berkepanjangan. *Kedua*, menguatnya peran dan posisi politik organisasi nasionalis-

sekuler dalam pergerakan nasional Indonesia.²¹

Sifat keorganisasian MIAI menurut Harry J. Benda dan Sya'roni sebagaimana dikutip oleh Suwarsono adalah lebih berupa federasi yang berorganisasi secara longgar, sukarela, dan bukan satu kesatuan aksi yang berdisiplin kuat. Namun demikian, ia telah berfungsi sangat baik sebagai wadah pemersatu umat, yang diistilahkan Suwarsono sebagai rumah persatuan.²²

Kesadaran akan pentingnya membawa umat Islam untuk bangkit menguasai peradaban, tampaknya menjadi semangat dari kelahiran MIAI itu. Dalam kondisi demikian, maka lahirnya MIAI dapat dikatakan sebagai peralihan strategi perjuangan umat bukan hanya dari struktural ke kultural, tetapi juga ke strategi mobilitas sosial. Gerakan MIAI memang bukan hanya sebagai wadah strategi mobilitas sosial, tetapi pada saat yang sama ia juga memainkan peran stategi kultural. Dalam batas tertentu, ia juga tetap memainkan peran dalam strategi struktural. Bergabungnya MIAI dalam GAPI (Gaboengan Politik Indonesia) yang dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dari Partai Sarekat Islam, dapat dibaca sebagai strategi struktural itu. Meskipun kemudian, MIAI keluar dari GAPI karena kudeta Mr. Sartono dalam kepemimpinan GAPI dan

²⁰ *Ibid.*, 560-561.

²¹ Menurut Suwarsono, sampai dengan awal tahun 2017, belum ada kajian yang mendalam yang diterbitkan dalam bentuk buku tentang MIAI. Hanya ada dua kajian salah satunya ditulis oleh Mizan Sya'roni, "The Majlisul Islamil A'la

Indonesia (MIAI): Its Socio-Religious and Political Activities" *Thesis tidak diterbitkan* (Montreal: McGill University, 1998). Lebih jauh lihat Suwarsono Muhamad, *UII Way...*, 13.

²² *Ibid.*, 14.

selebaran yang dibuatnya pro penjajahan Belanda.²³

Bukan hanya sebagai gerakan kultural dan mobilitas sosial, MIAI disebut Suwarsono sebagai rumah filantropi Islam.²⁴ Strategi mobilitas sosial itu terlihat dari tiga proyek besar MIAI, yaitu pembangunan sebuah masjid nasional, sebuah universitas Islam, dan lembaga zakat (disebut Baitul Mal) untuk mengelola zakat dan fitrah. Selain tiga proyek besar tersebut, untuk menyebarkan ide-ide dan gagasan, MIAI juga menerbitkan majalah berita dwi mingguan *Soeara MIAI*. Proyek pendirian Baitul Mal ini tampaknya berhasil, tercatat pada Oktober 1943 telah berdiri 35 cabang Baitul Mal di 35 Kabupaten di Jawa, jumlah yang menurut Fauzia sangat mengesankan untuk waktu yang singkat. Proyek pendirian Baitul Mal tersebut berhenti ketika MIAI dibubarkan karena dianggap lebih mengidealkan Islam daripada mendukung Dai Nippon.²⁵

Proyek pembangunan masjid nasional dan universitas belum terwujud sampai organisasi ini dibubarkan. Namun demikian,

semangat mendirikan universitas terus digelorakan dan menjadi propaganda gerakan yang disebarakan melalui majalah *Soeara MIAI*. Hampir pada setiap edisi, majalah tersebut terus memuat tulisan-tulisan yang bersifat mendorong dan memacu timbulnya sebuah lembaga pendidikan Islam. Salah satunya adalah pada edisi 30 Radjab 1362 (1942) yang memuat tulisan yang bertajuk “Menghadapi Pendidikan Ra’jat”.²⁶

Pada tahun 1938, Dr. Soekiman Wirjosandjojo di Jawa Tengah pernah menyelenggarakan musyawarah dengan beberapa ulama dan kaum cendekiawan untuk membicarakan usaha mendirikan Perguruan Tinggi Islam, yang diberi nama “Pesantren Luhur”.²⁷

Dr. Satiman Wirjosandjojo juga pernah melontarkan pentingnya lembaga pendidikan tinggi Islam dalam majalah *Pedoman Masyarakat* No. 15 Tahun IV 1938, menyusul ide yang disampaikan Dr. Soekiman di atas. Alasan yang dikemukakan Satiman ialah sebagai berikut:

Sewaktoe Indonesia tidoer, onderwijs (pengadjaran) agama di pesantren

²³ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah...*, 566-569.

²⁴ Studi komprehensif tentang filantropi Islam ditulis oleh Amelia Fauzia, dosen sejarah dan kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara*, diterbitkan oleh Gading di Yogyakarta tahun 2016. Buku tersebut merupakan terbitan dalam bahasa Indonesia, setelah sebelumnya diterbitkan dalam bahasa Inggris *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, yang diterbitkan penerbit ternama, EJ Brill di Leiden dan Boston tahun 2013. Buku itu semula merupakan disertasi untuk menyelesaikan S3 di Studi Asia, Melbourne University, Australia. Tidak tanggung-tanggung, sebagai sebuah kajian

tentang filantropi yang komprehensif, buku tersebut diberi pengantar oleh dua ahli sejarah dunia, Prof. Azyumardi Azra dan Prof. MC. Ricklefs.

²⁵ Harry J Benda, *The Crescent and The Rising Sun Indonesian Muslim under the Japanese Occupation* (USA: Foris Publication, 1983), 144. Lihat juga Ameli Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara* (Yogyakarta: Gading, 2016), 172 dan 185.

²⁶ *Soeara MIAI*, 30 Radjab 1362 H (1942).

²⁷ Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed.), *Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), xviii.

soedah mentjoekoepi keperluan oemoem. Akan tetapi setelah Indonesia bangoen, maka diperloekan adanja sekolah tinggi agama. Apalagi dengan kedatangan kaoem Kristen jang banjak mendirikan sekolah dengan biaja rendah dan dikelola oleh orang-orang berpendidikan tinggi, maka keperluan adanja sekolah tinggi agama Islam itoe semakin terasakan lagi, sebab kalaoe tidak, pengaroeh Islam akan semakin ketjil.²⁸

Dr. Satiman Wirjosandjojo, selain menuliskan gagasannya dalam majalah tersebut juga menyampaikannya ke dalam forum Muktamar *Majlis Islam A'la Indonesia* (MIAI) tahun 1939. Tindak lanjut dari hasil muktamar tersebut kemudian didirikan Perguruan Tinggi Islam di Solo, yang dimulai dari tingkat menengah atas yang diberi nama IMS (*Islamische Middelbare School*). Perguruan ini hanya dapat hidup sampai tahun 1941 dan terpaksa ditutup karena pecahnya Perang Dunia II.²⁹

Wacana tentang pendirian lembaga pendidikan Islam terus digulirkan, bukan saja melalui forum-forum resmi seperti muktamar, tetapi juga melalui tulisan-tulisan para tokoh muslim yang diterbitkan di berbagai media massa. Salah satunya adalah tulisan H. A. Alisaad yang berjudul “Pendidikan Tinggi

Islam” dimuat dalam Surat Kabar Mingguan “Penoentoen Pikiran” yang terbit pada bulan Maret 1939 M.³⁰

Pada perkembangan berikutnya, keinginan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam terus digulirkan oleh MIAI, sebagai sebuah organisasi yang telah diakui secara sah sebagai Pusat Pimpinan Persatuan Umat Islam di Indonesia.³¹

Ketika MIAI dibubarkan, organisasi pengganti, yakni Masjoemi meneruskan cita-cita perjuangan MIAI tersebut. Pada rencana Pidato di Radio tentang “Penjelasan Lahirnya Masjoemi”, KH.M. Mansoer menerangkan bahwa organisasi tersebut selain melanjutkan usaha-usaha yang telah dilakukan MIAI, juga bertujuan sebagai berikut:

Mengendalikan dan merapatkan perhubungan antara perkumpulan-perkumpulan agama di Jawa dan Madura, serta memimpin dan memelihara pekerjaan perkumpulan perkumpulan itu untuk mempertinggi peradaban, agar supaya segenap umat Islam membantu dan menyumbangkan tenaganya untuk membentuk lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, yang memang sesuai dengan perintah Allah.³²

²⁸ *Pedoman Masyarakat* No. 15 Tahun IV 1938.

²⁹ Dahlan Thaib dan Moh. Mahfud, *5 Windu UII, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Universitas Islam Indonesia Jogjakarta 1945 – 1984*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 11.

³⁰ *Penoentoen Pikiran*, Maret 1939

³¹ Pengakuan tersebut mengemuka melalui sidang para pemuka Islam di Jakarta tanggal 5 September 1942 dan sekaligus juga diputuskan melalui sidang tersebut untuk menyerahkan segala hal yang berkenaan dengan Islam di Indonesia

kepada MIAI. Pada “Sidang MIAI Genap Lengkap” tanggal 5 Nopember 1942, selain menguatkan keputusan di atas, juga mengesahkan Rancangan Anggaran Dasar MIAI yang baru. Pada pasal 3 ayat 6 anggaran dasar tersebut ditegaskan bahwa tujuan MIAI adalah memperbaiki segala kepentingan umat Islam yang termasuk dalam urusan pengajaran dan pendidikan. Lihat *Soeara MIAI*, 3 Dzulqo’dah 1362/1 Nopember 1943, 6-7.

³² *Pandji Poestaka* edisi Peringatan 8-12-’01, 1036.

Usaha yang dilakukan Masjoemi juga hampir sama dengan MIAI, yaitu di antaranya menerbitkan majalah yang bernama “Soeara Moeslimin Indonesia” yang juga terbit tiap tengah bulan sekali. Pada berbagai edisi, majalah tersebut menerbitkan berbagai tulisan tentang cita-cita Indonesia merdeka dan dorongan pentingnya pendidikan bagi rakyat untuk mengisi Indonesia merdeka. Salah satu yang menarik adalah pidato Drs. Moh. Hatta yang berjudul “Pendidikan Rakjat Oentoek Mentjapai Indonesia Merdeka” pada tanggal 27 Desember 1944 di depan Panti Pengetahuan Umum Jakarta. Menurut Moh. Hatta, sebagaimana disampaikan dalam pidato tersebut, yang terpenting bagi rakyat untuk menuju cita-cita Indonesia merdeka adalah dengan pendidikan, bukan saja pendidikan bagi para pemimpin, pangreh praja, kaum terpelajar, dan saudagar, tetapi yang terpenting justru pendidikan bagi rakyat jelata.³³

Keinginan untuk mempunyai sebuah Perguruan Tinggi Islam juga didasarkan pada keprihatinan karena tidak adanya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang mampu mengajarkan Islam secara mendalam. Memang pada waktu itu di Jawa telah ada 1.300 buah lembaga pendidikan, tetapi dari jumlah itu sangat sedikit yang mempunyai peralatan lengkap hingga layak disebut sekolah. Pada jumlah itu pun yang disebut Sekolah Islam Tinggi (setingkat SMU), hanya

20 buah. Oleh karena itu, pemuda-pemuda yang ingin memperdalam agama secara sungguh-sungguh terpaksa meninggalkan Indonesia untuk belajar Islam di Mesir atau di India. Akan tetapi di antara mereka, sedikit sekali yang mampu menyelesaikan studinya dengan baik karena kurangnya pengetahuan dasar yang diterimanya sewaktu di tanah air.³⁴

Sejak Indonesia di bawah jajahan Jepang (1942 – 1945), seluruh partai Islam dibubarkan kecuali empat organisasi besar yang tergabung dalam MIAI, yaitu NU, Muhammadiyah, PUI yang berpusat di Majalengka, dan PUII yang berpusat di Sukabumi. Empat organisasi tersebut kemudian bergabung dalam satu wadah, yaitu Masjoemi, yang merupakan penjelmaan baru dari MIAI.

Pada tahun 1945, Masjoemi mengadakan rapat yang menghasilkan dua keputusan penting, yaitu: *pertama*, membentuk barisan *mujahidin* dengan nama *Hizbullah*, untuk berjuang melawan sekutu bersama-sama dengan pemerintah *Dai Nippon* (Jepang) untuk mewujudkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. *Kedua*, mendirikan Perguruan Tinggi Islam dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang kemudian menjadi University Islam Indonesia.

Sebagai realisasi dari keputusan itu, kemudian pada bulan April 1945, Masjoemi mengadakan rapat yang dihadiri oleh wakil-

³³ Moh. Hatta, “Pendidikan Bagi Rakjat Oentoek Mentjapai Indonesia Merdeka”, *Soeara Moeslimin Indonesia*, No. 2 Th. 3, 13 Muharam 1364/15 Januari 1945, 3.

³⁴ *Soeara Moeslimin Indonesia*, No. 12 Th. 3, 4 Radjab 1364/15 Januari 1945, 13

wakil dari PBNU, PB Muhammadiyah, PB PUI, PB PUII, para ulama dan intelektual serta para pejabat pemerintah dari Departemen Agama (*Gunseikanbu Syunobu*). Secara lengkap, yang ikut hadir dalam rapat tersebut adalah: (1) Perwakilan dari PBNU (KH. Abdul Wahab, KH. Bisri, KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur dan KH. Zainul Arifin); (2) perwakilan dari PB Muhammadiyah (Ki Bagus Hadikusumo, KH. Mas Mansur, KH. Hasyim, KH. Faried Ma'ruf, KH. Abdul Mukti, KH. M. Yunus Anis dan Kartosudarmo); (3) perwakilan PB Persatuan Umat Islam (KH. Abdul Halim dan Djunaedi Mansur); (4) PB PUII (KH. Ahmad Sanusi, KH. Zarkasyi dan Somaatmadja); (5) kalangan ulama dan intelektual (KH. Imam Ghazali, Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Wondoamiseno, Abikusno Cokrosujoso, Anwar Cokroaminoto, Harsono Cokroaminoto, Mr. Moeh. Roem, Baginda H. Dahlan Abdullah); dan (6) perwakilan dari Departemen Agama (*Gunseikanbu Syunobu*) (KH. A. Kahar Muzakkir, KH.R. Mohammad Adnan dan Imam Zarkasyi).³⁵

Rapat tersebut berhasil memutuskan untuk membentuk Panitia Perencana Pendirian STI. Panitia pendirian STI yang dibentuk dalam rapat tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang –biasa disebut dengan “panitia sembilan”–yang terdiri dari: Ketua (Drs. Moh. Hatta), Wakil Ketua (Mr. Suwandi), Sekretaris (Dr. Ahmad Ramali),

Anggota (KH. Mas Mansur, KH. A. Wahid Hasyim, KH. R. Fatchurrahman Kafrawi, KH. Farid Ma'ruf, KH. Abdul Kahar Muzakkir, dan Notulis (Kartosudarmo).³⁶

Tugas panitia sembilan mirip formatur yang menyiapkan semua aspek teknis dan non teknis, antara lain: (1) Peraturan Umum STI; (2) Peraturan Rumah Tangga; (3) Peraturan Penerimaan Mahasiswa Baru; (4) Menetapkan Susunan Badan Wakaf Pendiri STI yang terdiri dari: Pengurus Badan Wakaf, Dewan Pengurus/Dewan Kurator dan Senat STI; dan (5) Susunan Dewan Guru (dosen) dan Mata Pelajarannya.³⁷ Setelah semua perangkat siap, maka dilakukan penerimaan mahasiswa baru STI.

Sampai batas waktu pendaftaran yang telah ditetapkan tersebut, terdapat 78 orang yang mendaftarkan diri. Setelah diadakan tes seleksi oleh tim penguji yang diketuai oleh KH. A. Kahar Muzakkir, dari 78 calon mahasiswa yang mendaftarkan diri, terdapat 14 orang yang diterima, 11 orang dari Sekolah Menengah Tinggi (SMT) dan 3 orang dari Madrasah Islam Menengah (MIM), sedangkan sisanya, 64 orang yang tidak lulus diterima di Tingkat Pendahuluan. Murid-murid Tingkat Pendahuluan dibagi dalam dua kelompok, yaitu Kelompok A dan Kelompok B. Kelompok A adalah kelompok murid yang berasal dari SMT untuk diberi Agama dan Bahasa Arab, dan Kelompok B adalah kelompok murid yang berasal dari MIM,

³⁵ Dewan Pengurus Pusat University Islam Indonesia, *10 Tahun University Islam Indonesia*, (Yogyakarta: 1955), 61.

³⁶ Djauhari Muhsin dkk., *Sejarah dan Dinamika UII* (Yogyakarta: Badan Wakaf UII, 2002), 28.

³⁷ *Ibid.*, 29

untuk diberikan pelajaran ilmu umum setingkat kelas III SMT.³⁸

Setelah persiapan kelengkapan untuk berdirinya sebuah perguruan tinggi terpenuhi, maka Sekolah Tinggi Islam yang telah dicitakan tersebut dapat segera dibuka secara resmi. Untuk kepentingan upacara pembukaan dan modal awal pendidikan, Departemen Agama Pemerintah Balatentara Jepang memberikan bantuan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).³⁹ Bantuan modal awal mengandung maksud bahwa berdirinya STI mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah.

Pelaksanaan upacara pembukaan STI dipilih Hari Ahad Legi tanggal 27 Rajab 1364 atau tanggal 8 Juli 1945 di Kantor Imigrasi Pusat, Gondangdia, Jakarta. Dipilihnya tanggal 27 Rajab sebagai hari peresmian yang bertepatan dengan hari Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw, karena para pendiri waktu itu mengharap *tafa'ul* (harapan baik) agar STI menjadi lambang kesucian turunnya perintah shalat dan dapat mencapai kemajuan kemajuan yang terus meningkat.

Pada upacara yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut, turut hadir memberikan sambutan secara berturut-turut adalah; Perdana Menteri Jepang P.J.M. Gunseikan; Kenkoku Gagkuintyoo, Ika Daigakutyoo, KH. Abdul Kahar Muzakkir, Ir. Soekarno, dan KH. A Wachid Hasyim. Selain sambutan-sambutan, upacara tersebut juga dilengkapi

dengan pembacaan ikrar janji mahasiswa STI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

A'udzubillahi minasyaithanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kami pelajar-pelajar Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, mengikrarkan janji dan membulatkan niat akan menyerahkan segenap tenaga kami dalam menuntut ilmu ilmu yang diajarkan pada Sekolah Tinggi Islam ini serta menjunjung tinggi akan akhlak dan budi pekerti Islam, agar kami dengan pertolongan Allah SWT., menjadi muslim Indonesia yang utama dan anggota yang berguna bagi masyarakat Indonesia, sejajar dengan lain-lain bangsa Asia Timur Raya, serta dapatlah menunaikan kewajiban kami sebagai pemimpin.⁴⁰

Berdirinya STI (yang kelak menjadi UII), atas prakarsa umat Islam Indonesia yang tergabung dalam organisasi MIAI. Cita-cita diteruskan Masjoemi setelah MIAI dibubarkan, dan sampai dengan pendiriannya ditopang kuat oleh organisasi besar yang tergabung dalam Masjoemi sebagaimana disebutkan di atas (Muhammadiyah, NU, PUI, dan PUII), selain itu juga mendapat dukungan dari pemerintah. Sampai di sini terbaca jelas, bahwa berdirinya UII merupakan strategi perjuangan umat Islam dalam strategi kultural dan mobilitas sosial. Strategi jangka panjang untuk mengangkat peradaban Islam dan mempersiapkan pemimpin bangsa mengisi Indonesia merdeka.

UII: Modernisme dan Tradisionalisme yang Menyatu dalam Satu Gerakan

³⁸ Dewan Pengurus Pusat Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *10 Tahun University Islam Indonesia*, 64

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Soeara Moeslimin Indonesia*, No. 14 Tahun 3, 15 Juni 1945/4 Sya'ban 1364, 6-8.

Mempertentangkan antara modernisme dan tradisionalisme dalam sejarah perjuangan Islam di Indonesia pasca terbentuknya MIAI, wadah persatuan umat Islam, tampaknya tidak terlalu relevan. Pesatuan dan kebangkitan umat tampak lebih penting dibandingkan dengan sifat gerakan masing-masing organisasi. Namun demikian, pada perkembangan-perkembangan berikutnya, bahkan sampai Indonesia merdeka, watak pergerakan masing-masing organisasi tetap saja berbeda. NU dianggap sebagai representasi dari gerakan tradisionalisme sedang Muhammadiyah sebagai representasi gerakan modernism. Penyebutan ini tanpa bermaksud mempertentangkan, keduanya saling mengisi dalam gerakan perjuangan. KH. Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU, dalam sebuah unggahan video yang sempat viral di media media sosial, menyebut Muhammadiyah dan NU ibarat sepasang sandal. “Meskipun NU dan Muhammadiyah berbeda dalam *furu’* bahkan *ibnu al-furu’* tetapi wawasan keumatan dan wawasan kebangsaannya sama”.⁴¹ Penyebutan sepasang sandal tersebut untuk menggambarkan bahwa NU dan Muhammadiyah adalah organisasi besar di Indonesia yang saling mengisi, berbeda tetapi saling melengkapi.

Meskipun demikian, menelusuri watak ideologis UII melalui penelusuran tokoh pendiri tetap penting untuk dilakukan. Watak ideologis dari sebuah institusi pada umumnya

dapat ditelusuri dari ideologi pendiri institusi tersebut. Pendiri dalam hal ini akan diwakili oleh Panitia Persiapan Pendirian STI, yang dibentuk rapat besar organisasi-organisasi Islam yang tergabung dalam Masjoemi (Muhammadiyah, NU, PUI, dan PUII) dan pemerintah (yang diwakili *Shumubu*, departemen Agama), sebagaimana disebutkan di atas. Panitia pendirian yang dimaksud selanjutnya disebut dengan Panitia Sembilan, karena terdiri dari sembilan orang, yaitu: Ketua (Drs. Moh. Hatta), Wakil Ketua (Mr. Soewandi), Sekretaris (Dr. Ahmad Ramali), Anggota (KH. Mas Mansur, KH. A. Wahid Hasyim, KH. R. Fatchurrahman Kafrawi, KH. Farid Ma’ruf, KH. Abdul Kahar Muzakkir, dan Notulis (Kartosudarmo).⁴²

Akar ideologi UII dapat dilacak dari ideologi dari masing-masing tokoh yang terlibat sebagai panitia perencana pendirian STI di atas. Sebagai panitia perencana, mereka diyakini sebagai arsitek, peletak dasar ideologi, konseptor filosofis dari berdirinya UII, selain kerja-kerja administrative yang harus dilakukan untuk berdirinya sebuah lembaga, apalagi perguruan tinggi Islam pertama. Oleh karenanya, akan ditelusuri biografi ringkas dari masing-masing tokoh tersebut, sepanjang yang dapat ditelusuri, untuk menemukan benang merah ideologi lahirnya UII. Biografi yang dimaksud setidaknya terkait dengan pendidikan dan afiliasi organisasi yang diikuti.

⁴¹ Ceramah disampaikan dalam rangka Reuni Akbar Alumni dalam peringatan 90 Tahun Pondok Modern Gontor tanggal 3 September 2016. Video lengkap diunggah dalam akun Youtub

https://www.youtube.com/watch?v=ETeG_fQve6Q, diakses tanggal 5 Mei 2020 pukul 08.47 WIB.

⁴² Djauhari Muhsin dkk., *Sejarah dan Dinamika UII* (Yogyakarta: Badan Wakaf UII, 2002), 28.

Muhammad Hatta. Keterlibatan Muhammad Hatta dalam pendirian UII sepertinya mewakili kelompok intelektual. Pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi berdirinya UII pada masa awal, termasuk saat dibukanya kembali STI yang pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, pidato pembukaan juga disampaikan oleh Hatta. Lahir di Bukittinggi Sumatra Barat 12 Agustus 1902 dan wafat 14 Maret 1980 di Jakarta dalam usia 77 tahun. Mohammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah enam bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas tiga. Ia lalu pindah ke ELS di Padang (kini SMA Negeri 1 Padang) sampai tahun 1913, dan melanjutkan ke MULO sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan memengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota Serikat Oesaha dan aktif dalam Jong Sumatranen Bond sebagai bendahara. Kegiatannya ini tetap dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Prins Hendrik School. Mohammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Mulai tahun 1921 ia meneruskan pendidikan di Belanda, bersekolah di *Handels Hogeschool* (kelak sekolah ini disebut

Economische Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam), selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial *Indische Vereeniging* yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hadjar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker.⁴³

Tercatatnya Muhammad Hatta sebagai murid dari Muhammad Djamil Djambek dan Abdullah Ahmad, dua tokoh modernis Islam di Sumatra Barat serta pada saat yang sama ia ditunjuk sebagai ketua panitia perencanaan pendirian STI (UII) menunjukkan bahwa UII adalah bagian dari gerakan modernisme Islam di Indonesia.

Panitia berikutnya adalah Mr. Soewandi, lahir Oktober 1899 di Kebumen dan meninggal 6 Maret 1964. Setelah lulus dari sekolah pangreh praja, meraih gelar sarjana hukum dari *Rechtshoogeschool te Batavia*, kemudian ia mengantungi ijazah notaris. Berikutnya menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Sjahrir II dan Sjahrir III. Dalam kabinet Sjahrir III, Soewandi menjabat Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Ia menggagas sistem ejaan yang kemudian dikenal dengan nama sistem Ejaan Soewandi atau dikenal juga sebagai sistem Ejaan Republik Indonesia. Ejaan Soewandi menggantikan *Ejaan van Ophuijsen* pada 19 Maret 1947 dan berlaku selama 25 tahun sebelum diganti oleh pemerintah Orde Baru dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) pada bulan Agustus

43

https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta#

[CITEREFImran1991](#), diakses tanggal 5 Mei 2020 jam 09.56 WIB.

1972.⁴⁴ Keterlibatan Mr. Soewandi dalam panitia pendirian STI mewakili kelompok intelektual.

Sebagai sekretaris Dr. Ahmad Ramali, tidak ditemukan biografi. Berikutnya anggota tercatat KH Ahmad Mansur, lahir pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1896 di Surabaya. Ibunya bernama Raudhah, seorang wanita kaya yang berasal dari keluarga Pesantren Sidoresmo, Wonokromo, Surabaya. Ayahnya bernama K.H. Mas Ahmad Marzuqi, seorang pioneer Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Dia berasal dari keturunan bangsawan Astatinggi Sumenep, Madura. Dia dikenal sebagai imam tetap dan khatib di Masjid Agung Ampel Surabaya, suatu jabatan terhormat pada saat itu. Ia tercatat sangat senang mengikuti majelis pengajian yang diselenggarakan KH Ahmad Dahlan. Pendidikan diperoleh dari keluarganya, menjadi satri Kia Khalil Bangkalan, dan 1908 menunaikan ibadah haji sekaligus belajar agama kepada Syekh Mahfud Termas di Mekah. Empat tahun belajar di Mekah, karena situasi politik Arab Saudi, memaksanya untuk pindah dan meneruskan pendidikan di Al-Azhar Cairo Mesir, kurang lebih dua tahun. Pada tahun 1915 ia kembali ke Indonesia setelah sebelumnya singgah ke Mekah selama kurang lebih satu tahun. Sekembalinya ke tanah air, bergabung di Sarekat Islam pimpinan HOS Cokroaminoto. Bersama KH. Abdul Wahab Chasbullah, ia membentuk majelis diskusi

yang diberinama *tashwir al-afkar*. Majelis ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama di Surabaya mendiskusikan berbagai macam persoalan umat Islam, termasuk masalah politik perjuangan melawan penjajah. Aktifitas di *Tashwirul Afkar* mengilhami aktifitas di berbagai kota seperti *Nahdhah al-Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) yang menitikberatkan pada pendidikan. Sebagai kelanjutan Nahdhah al-Wathan, Mas Mansur dan Abdul Wahab Hasbullah mendirikan madrasah yang bernama *Khitab al-Wathan* (Mimbar Tanah Air), kemudian madrasah *Ahl al-Wathan* (Keluarga Tanah Air) di Wonokromo, *Far'u al-Wathan* (Cabang Tanah Air) di Gresik dan *Hidayah al-Wathan* (Petunjuk Tanah Air) di Jombang. KH. Mas Mansur keluar dari *Tashwirul Afkar* karena terjadi perbedaan pendapat dengan KH. Abdul Wahab Chasbullah tentang khilafiyah, ijihad dan madzhab. Ia menjadi Ketua PP Muhammadiyah tahun 1937 – 1941.⁴⁵ Latar belakang pendidikan dan kehidupan KH. Mas Mansur tersebut menunjukkan bahwa gerakan dan pemikirannya mencerminkan kelompok modernis.

Panitia yang lain seperti KH. Wahid Hasyim, masyhur dari kalangan Nahdhatul Ulama, begitu juga dengan Prof. KH. Fatchurrahman Kafrawi. Sedangkan KH. Farid Ma'ruf dan Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakir masing-masing adalah aktivis Muhammadiyah.

⁴⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Soewandi>, diakses tanggal 11 Mei 2020

⁴⁵ m.muhammadiyah.or.id/id/content-159-det-kh-mas-mansyur.html, diakses tanggal 11 Mei 2020

Latar belakang dari panitia pendiri STI tersebut dapat dikatakan merupakan representasi dari gerakan modernisme Islam sekaligus gabungan dengan kaum tradisionalis. Sekalipun demikian, watak modernismenya lebih kuat, dan diharapkan menjadi universitas Islam kebanggaan Indonesia.

Watak modernis, bahkan progresif dari UII juga terlihat dari dikembangkannya STI dalam waktu singkat dari sekolah tinggi menjadi universitas. Di tengah perjuangan bangsa Indonesia di masa revolusi, para pimpinan STI berpikir progresif, dalam bahasa Suwarsono melampaui zaman, mengembangkan STI menjadi UII setelah pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Dalam buku *10 Tahun University Islam Indonesia*, keinginan untuk mengembangkan STI menjadi universitas didasari oleh beberapa hal: (1) Dalam Islam tidak ada pemisahan antara paham kenegaraan dan paham agama; (2) Adanya kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan hukum-hukum Allah; (3) Belum adanya perguruan tinggi yang berdasarkan Islam yang mampu menyiapkan tenaga ahli dalam berbagai lapangan; (4) Pada zaman penjajahan, pendidikan hanya diselenggarakan untuk mendukung kepentingan penjajah; (5) Umat Islam kekurangan tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan; dan (6) Dirasakan perlunya memberikan kesempatan (penyaluran) kepada sekolah-sekolah agama

(madrasah) dan pelajar-pelajar dari pesantren untuk dapat meneruskan pelajaran ke Perguruan Tinggi yang memberikan ilmu-ilmu keahlian (praktis kemasyarakatan).⁴⁶

Untuk mewujudkan keinginan mengembangkan STI menjadi universitas, pada tanggal 3 November 1947 dibentuk Panitia Perbaikan STI yang terdiri dari: KH. Fatchurrahman Kafrawi (Ketua), H. Farid Ma'roef (Wakil Ketua), K. Malikus Suparto (Sekretaris), KH. Wachid Hasyim, KH. A. Kahar Muzakkir, Drs. Sigit, Mr. Soenarjo, Dr. A. Ramali, M. Kartosudarmo, Sulaiman (Anggota). Pada tanggal 14 Desember 1947 (satu bulan lebih sejak dibentuk) panitia menetapkan untuk mengubah Sekolah Tinggi Islam menjadi "University Islam Indonesia (UII)".

Rasionalitas pengembangan STI menjadi UII terekam pula dalam laporan panitia yang menyiratkan keprihatinan karena tidak adanya sebuah perguruan tinggi yang mampu mengajarkan secara integral dengan ilmu-ilmu umum, sehingga pelajar harus rela "menderita" di negeri orang untuk memperdalam agama. Kondisi itu terekam dalam dokumen laporan panitia perbaikan STI sebagai berikut:

...sudah berpuluh-puluh tahun anak-anak kita yang berjiwa nasional terpaksa mengembara ke negeri orang, meninggalkan kaum keluarga dan tanah air, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menderita untuk menjadi pelajar pada bermacam-macam university, terserak di Eropah, Mesir, Mekah, bertaburan di Baghdad dan India dan

⁴⁶ Dewan Pengurus Pusat Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, *10 Tahun University Islam Indonesia*, 64

sebagainya, jauh dan terasing dari tiap-tiap pergaulan masyarakat dan perjuangan bangsa. Apakah kita tidak sanggup dan tidak mampu mendirikan university sendiri? Apakah umat Islam Indonesia dengan penjajahan ganas selama 350 tahun telah menjadi lumpuh sehingga tidak mampu mendirikan dan memelihara sekolah-sekolah tinggi dan university sendiri?⁴⁷

Setelah persiapan-persiapan untuk menjadikan Sekolah Tinggi Islam (STI) menjadi University Islam Indonesia (UII) dirasa cukup, pada tanggal 22 Maret 1948 dilakukan upacara pembukan UII untuk Kelas Pendahuluan, bertempat di Dalem BPH Poeroebojo Ngasem Yogyakarta.⁴⁸

Pengembangan STI menjadi UII dalam waktu singkat sejak berdirinya, menunjukkan para pengelola UII sangat progresif dalam mengembangkan UII. Watak progresif ini menjadi salah satu karakteristik UII dan bagian dari identitas keislamannya.

Penutup

Integrasi keilmuan dan keislaman di UII yang menjadi salah satu pesan dari Muhammad Hatta pada pembukaan kembali STI di Yogyakarta, dapat ditemukan akarnya jauh sebelum pernyataan Muhammad Hatta itu. Secara genealogis, akar ideologis integrasi keilmuan dan keislaman dapat dilacak pada semangat berdirinya UII, menandakan beberapa ciri: *Pertama*, UII lahir sebagai kelanjutan dari system pendidikan madrasah. Sistem pendidikan madrasah di Indonesia

merupakan bentuk modernisasi pendidikan, yang di dalamnya ada keterpaduan system pendidikan Barat (Belanda) yang sekuler dan system pendidikan pesantren yang khas Islam. Pemaduan kedua system itu dimaksudkan juga sebagai bentuk keterpaduan konsep keilmuan dari keduanya. Madrasah yang berdiri kala itu lebih pada level menengah ke bawah, belum ada yang tingkat perguruan tinggi.

Lahirnya STI yang kelak berkembang menjadi UII merupakan bentuk keterpaduan ilmu dan Islam itu pada level perguruan tinggi. *Kedua*, UII lahir sebagai bentuk eklektisisme gerakan tradisional dan modern. Sejarah mencatat bahwa pendiri UII berasal dari berbagai kalangan Islam (Muhammadiyah, NU, Persis, PUI, PUII, kalangan intelektual) yang bersatu padu dalam membangun perguruan tinggi. Organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam tersebut secara umum dapat dikategorikan sebagai representasi dari gerakan tradisional dan gerakan modern. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa UII merupakan bentuk eklektisime gerakan modern dan tradisional. Implikasi yang lebih jauh dari itu adalah, keterpaduan ilmu dan agama menjadi isu sentral. *Ketiga*, UII lahir sebagai gerakan kultural dan mobilitas sosial. Meminjam istilah Kuntowijoyo, gerakan struktural Umat Islam yang memakai strategi politik seringkali berakhir tidak efektif, sehingga beralih ke gerakan kultural. Salah satu bentuk gerakan

⁴⁷ Laporan Panitia Perbaikan STI, Yogyakarta, 1948

⁴⁸ Mahmud Junus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 288.

kultural adalah melahirkan sebuah lembaga pendidikan. Lahirnya lembaga pendidikan bukan hanya dipandang sebagai gerakan kultural, tetapi juga mobilitas sosial, lebih tepatnya mobilitas sosial vertikal.

UII lahir untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, sekaligus menyiapkan pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa yang dimaksud adalah mereka yang terbekali dengan ilmu-ilmu umum sekaligus ilmu agama sebagai ruh kompetensinya. Dalam konteks ini, maka semangat melahirkan pemimpin bangsa yang menjadi cita-cita besar berdirinya UII perlu ditopang dengan kemampuan mengintegrasikan keilmuan dan keislaman.

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Jakarta: Kencana, 2013.
- Benda, Harry J. The Crescent and The Rising Sun Indonesian Muslim under the Japanese Occupation. USA: Foris Publication, 1983.
- Dewan Pengurus Pusat University Islam Indonesia, 10 Tahun University Islam Indonesia. Yogyakarta: Panitia Peringatan 10 tahun UII, 1955.
- Fauzia, Amelia. Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara. Yogyakarta: Gading, 2016.
- Hatta, Moh. "Pendidikan Rakjat Oentuk Mentjapai Indonesia Merdeka". Majalah Soeara Moeslimin Indonesia. No. 2 th. 3. 13 Muharram 1364H/15 Januari 1945
- Hidayat, Komaruddin dan Hendro Prasetyo (ed.). Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Islam. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam Departeman Agama RI, 2000.
- Junus, Mahmud. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.
- Kuntowijoyo. Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam bingkai Strukturalisme Transendental. Bandung: Mizan, 2001
- Makdisi, George. The Rise of College: Institutions of Learning in Islam and the West. Texas: Edinburg University Press, 1981.
- Muhammad, Suwarsono. UII Way: Menjadi Islami, Indonesiawi, dan Mondial. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Muhsin, Djauhari, Arief Akhyat, Suyanto, M. Roy Purwanto, Nurudin Muhammad Ali, Fahrurrozi, dan M. Zainal Abidin. Sejarah dan Dinamika UII. Cet. Ke-5. Yogyakarta: Badan Wakaf UII, 2006.
- Murtadho, Muhammad. Dinamika Sejarah Madrasah di Asia Tenggara. Jakarta: Pesagi Mandiri Perkasa, kerjasama naskah Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI degan UIN Jakarta Press, 2018.
- Nasihin. Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Noer, Deliar. Mohammad Hatta: Biografi Politik. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1990.
- Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004. Jakarta: Serambi, 2008.
- _____. A History of Modern Indonesia C. 1200. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Steenbrink, Karel A. Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Islam 2: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bandung: Salamadani, 2013.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. Api Sejarah 1. Cet. Ke-4. Bandung: Salamadani, 2013.
- Thaib, Dahlan dan Moh. Mahfud. 5 Windu UII, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Universitas Islam Indonesia Jogjakarta 1945 – 1984. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Yusuf, M. Yunan dkk. Ensiklopedi Muhammadiyah. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.